

**KESEJAHTERAAN EKONOMI ISLAM: Bukti Dari  
Masyarakat Penerima Manfaat Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDes) Karya Dermawan Dusun Dalam**

**Muhammad Fauzi<sup>1</sup>, Arzam<sup>2</sup>, Aidil Novia<sup>3</sup>, Hulwati<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Kerinci, <sup>2</sup>IAIN Kerinci, <sup>3</sup>UIN Imam Bonjol Padang; <sup>4</sup>UIN Imam  
Bonjol Padang

mf0093391@gmail.com<sup>1</sup>, arzamzain46@gmail.com<sup>2</sup>,  
aidilnovia@uinib.ac.id<sup>3</sup>, hulwati@uinib.ac.id<sup>4</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menilai kesejahteraan masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan dalam ekonomi Islam. Ini didasari bahwa gagasan kesejahteraan ekonomi konvensional dipandang tidak sesuai, yang hanya meletakkan dimensi kebutuhan materil (dunia) untuk menilai sejahteranya masyarakat. Karena itu, kesesuaian menilai sejahteranya masyarakat terletak dalam gagasan kesejahteraan ekonomi Islam, yang didalamnya terdapat penilaian dimensi kebutuhan spiritual (akhirat) dan materil (dunia), dengan mengacu lima prinsip tujuan syariat Islam (Maqasid Syariah). Penelitian ini mempergunakan pendekatan Mixed Method. Data penelitian dikumpul dari sumber primer, meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil kuesioner yang telah disebar/diisi oleh 100 responden yang diambil secara Purposive Sampling dan dihitung mengikuti teknik Slovin. Data kualitatif berupa observasi dan wawancara terhadap 6 responden yang diambil secara Snowball Sampling. Penelitian ini mempergunakan metode analisis deskriptif sebagai alat analisis data Mixed Method. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan sudah sejahtera dinilai dalam ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan oleh masyarakat penerima manfaat mampu mewujudkan dimensi

*kebutuhan spiritual meliputi menjaga agama (Hifdzu Din), jiwa (Hifdzu Nafs), akal (Hifdzu 'Aql), keturunan (Hifdzu Nasl), harta (Hifdzu Maal). Dan juga mampu mewujudkan dimensi kebutuhan materil meliputi kebutuhan dasar, sosio psikologis, dan pengembangan.*

**Kata kunci:** Kesejahteraan, Ekonomi Islam, Maqasid Syariah, Penerima Manfaat BUMDes

**Abstract:** *This study aims to assess the welfare of the beneficiaries of the Karya Dermawan BUMDes in the Islamic economics. This is based on the idea that conventional economic welfare is seen as inappropriate, which only places the dimensions of material (world) needs to assess the welfare of the community. Therefore, the suitability of assessing welfare of the welfare community lies in the idea of Islamic economic welfare, in which there is an assessment of the dimensions of spiritual (hereafter) and material (world) needs, with reference to the five principles of sharia purpose (Maqasid Syariah). This study uses a Mixed Method approach. The research data was collected from primary sources, including quantitative and qualitative data. Quantitative data in the form of questionnaire results that have been distributed/filled in by 100 respondents, taken by purposive sampling and calculated using the Slovin technique. Qualitative data in the form of observations and interviews with 6 respondents taken by Snowball Sampling. This study uses a descriptive analysis method as a Mix Method data analysis tool. This study shows that the beneficiaries of Karya Dermawan BUMDes are already prosperous, assessed in Islamic economics. This is evidenced by the beneficiary community being able to realize the dimensions of spiritual needs including maintaining religion (Hifdzu Din), soul (Hifdzu Nafs), mind (Hifdzu 'Aql), descendant (Hifdzu Nasl), property (Hifdzu Maal). And also able to realize the dimensions of material needs including basic needs, socio-psychological, and development.*

**Keywords:** Welfare, Islamic economics, Maqasid Sharia, BUMDes Beneficiaries

## Pendahuluan

Isu kesesuaian (*Compatibilty*) antara kesejahteraan ekonomi konvensional (*Conventional Economic Welfare*) dengan kesejahteraan ekonomi Islam (*Islamic Economic Welfare*) masih sangat hangat diperbincangkan. Gagasan ini, terlahir dari latar belakang pemikiran yang berbeda, yaitu ekonom konvensional dan ekonom Islam.

Para ekonom konvensional menuduh ekonom Islam dalam perspektif negatif mempelajari kesejahteraan suatu masyarakat. Mereka mengungkapkan bahwa *Compatibilty* sudah tampak dalam gagasan *Conventional Economic Welfare*, dimana sejahteranya masyarakat hanya bisa dinilai dari dimensi ketercapaian kebutuhan materil yang secara langsung tercipta pula kebahagiaan hidup (*Happines of Life*) yang lebih baik.<sup>1</sup> Tuduhan tersebut, sebenarnya sudah dibantah oleh ekonom Islam.<sup>2</sup> Secara faktual, dalam keadaan apapun tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam gagasan *Islamic Economic Welfare*.<sup>3</sup> Karena-*Compatibilty* menilai sejahteranya masyarakat tidak bisa mendasarkan

---

<sup>1</sup> A. C. Pigou, *The Economic of Welfare*, (London: Mac Millan, 1920), 3-5; M. Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (New York: Routledge, 2001), 53,56,80,89,92; V. Pareto, *Manual of Political Economy*, ed. Aldo Montesano et al, (Oxford: Oxpord University Press, 2014); N. Barry, *Welfare* (Minnesota: University of Minnesota Press, 1990), 1,15,30,43,61; I. Kucukaksoy, "Adam Smith's Conceptual Contributions to International Economics: Based on the Wealth of Nations," *BEH - Business and Economic Horizons*, Vol. 4, No. 1 (2011): 108–119; M. Albert & R. Hahnel, *Quiet Revolution in Welfare Economics* (Princeton: Princeton University Press, 2017); R. A. McCain, *Welfare Economics: An Interpretive History*, 1st ed. (New York: Routledge, 2019), 1,6 57, 101,205.

<sup>2</sup> M. D Puspardini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1 (2015): 45–59.

<sup>3</sup> Abdul Husain Muhammad, *Economic System in Islam: Compared with Capitalism and Socialism*, 2st ed. (Tehran: World Organization for Islamic Services, 1975); Masudul Alam Choudhury & Uzir Abdul Malik, *The Foundations of Islamic Political Economy*, 1st ed. (London: Palgrave Macmillan, 1992), 1, 19.

pada manifestasi dimensi kebutuhan materil saja, tetapi mendasarkan pada dimensi spritual, yang secara lansung terciptalah *Happiness of Life* dunia dan akhirat (*Falah*).<sup>4</sup>

*Compatibilty* gagasan *Islamic Economic Welfare* menilai sejahteranya masyarakat dari dimensi kebutuhan materil dan spritual (*Falah*), dapat mengacu pada tujuan syariat Islam (*Maqasid Syariah*) yang 5 (lima) antara lain *pertama* menjaga agama (*Hifdzu Din*). *Kedua* menjaga jiwa (*Hifdzu Nafs*). *Ketiga* menjaga akal (*Hifdzu 'Aql*). *Keempat* menjaga keturunan (*Hifdzu Nasl*). *Kelima* menjaga harta (*Hifdzu Maal*).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmed El-Ashker & Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History* (Leiden-Boston: Brill, 2006) 30-89; K. Ahmad, *Studies In Islamic Economic* (Jeddah: The Islamic Foundation, 1980); Y. Al-Qaradhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlak Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995); M. U. Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (London: International Institute of Islamic Thought, 1992); M. U. Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqasid Al-Shari'ah* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008); H. Furqani & M. A. H., "Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward," 8th International Conference on Islamic Economics and Finance Islamic, 2009, 1-14; M. A. Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies, 1994); M. A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice A Comperative Study* (India: Idarah Al-Adabiyah, 1988); Hossein Askari et al, *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application* (Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2015), 1-27 & 333-339.

<sup>5</sup> Aminah, "Maqhasid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerpan Dalam Ekonomi Islam," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 1 (2017): 167-184; A. N. Imana, "Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 Dan 2014- 2016)," Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017; Ismail, "Kesejahteraan Petani Jagung Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi Di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)," Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018; I. Rinawati, "Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatipark 2 Kota Batu Dalam Prespektif Maqashid Syariah," Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018; Renny Oktafia, "Waste Bank

Secara global maupun lokal, dimensi kebutuhan materil mendapatkan tempat yang tinggi dalam menilia sejahteranya masyarakat. Hal ini, dapat dilihat dalam rumusan *Product Domestik Buruto* (PDB);, rumusan *Net Economic Welfare* (NEW);, rumusan *Basic Need Approach* (BNA);, rumusan *Human Development Index* (HDI);.<sup>6</sup> Demikian juga dalam konteks nasional, menempatkan dimensi kebutuhan materil lebih utama, agaknya dimensi kebutuhan spiritual mendapatkan nilai lebih sedikit, seperti yang dirumuskan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat dengan BKKBN).<sup>7</sup>

Kehidupan sejahtera sangat sulit dicapai tanpa ada perhatian atau campur tangan dari pemegang kekuasaan (pemerintah).<sup>8</sup> Apalagi dalam konteks masyarakat desa, tangan pemerintah akan terlahir sebuah instrumen mencapai kesejahteraan yang diinginkan secara utuh atau *Continue*.<sup>9</sup>

Dari situ pula, diakui bahwa pemerintah Indonesia sudah banyak instrumen yang diluncurkan untuk menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat desa. Instrumen yang handal dan digadang-gadangkan saat-

---

And Community Welfare In Sidoarjo (Maqashid Sharia Perspective)". An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 1, (2021): 454-488.

<sup>6</sup> L. Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2004), 32-37; S. Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 69.

<sup>7</sup> Bappenas, *Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)* (Jakarta: Bappenas, 2010).

<sup>8</sup> Agus Arwani, "Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekatkokohkan NKRI", An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, (2015): 275-294.

<sup>9</sup> D. Solihin, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta: Yayasan Empat Sembilan Indonesia, 2014), 37-123; G. Sumodiningrat & A. Wulandari, *Membangun Indonesia Dari Desa; Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016); Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan* (Sumedang: UNPAD PRESS, 2016), 169.

ini, yaitu Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat dengan BUMDes).<sup>10</sup> BUMDes memberikan kesejahteraan masyarakat desa melalui unit-unit usaha yang didirikan. Setiap unit usaha yang didirikan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi desa, karena itu tiap-tiap desa yang telah mendirikan BUMDes mempunyai unit usaha yang berbeda-beda.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Asiyah, B. N., Fahriani, F. Z., Sy, M., Habib, M. A. F., & Sosio, S. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. Tulungagung: Akademia Pustaka

<sup>11</sup>Muhammad Fauzi et al, "Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village," *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 5, No. 3 (2021): 319–25; A. D. Huruta et al, "The Development of Village-Owned Enterprises: Lessons Learned from Ponggok Village," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 33, No. 1 (2020): 77–86; A. A. Alfirdausi & G. Riyanto, "The Role Of Village Owned Enterprises (BUMDes) On Efforts To Increase Original Village Income (PADES) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency)," *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, Vol. 4, No. 2 (2019): 64–71; I. Kania et al, "A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Village-Owned Enterprises in Indonesia," *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 15, No. 3 (2021), 432–450; J. A. Nurhasan & A. H. Munawir, "Efektivitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu," *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 1, No. 1 (2020): 89–99; Z. Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3 (2014): 424–440; B. Sudaryana, "The Model Of Development Policy Implementation Village Owned Enterprises In Indonesia," *Proceedings of the 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP)*, 2016; 23–29; A. Tjoetra et al, "Community Poverty Reduction Strategies through a Village-Owned Enterprise in Kampung Belakang Village, West Aceh Regency," *Proceedings of the 3rd International Conference on Social and Political Development - Volume 1: ICOSOP 3, 2, 2019*; 356–359; S. E. Winarti et al, "Pemberdayaan Kelompok Perempuan Menggunakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa," *Sosio Konsepsia; Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9, No. 2 (2020): 171–184.

Pendirian BUMDes Karya Dermawan, tepatnya pada tahun 2014, yang disahkan (diatur) melalui melalui Peraturan Desa Dusun-Dalam No. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan.

Dari perjalanan keberadaan BUMDes Karya Dermawan, tampak sudah mampu memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat melalui unit-unit usaha yang dibangun atau dikelola, antara lain Simpan Pinjam, Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Penyaluran Sarana Produksi (Saprodi), Bank Sampah, dan Perbengkelan. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan Bapak S.R yang mengungkapkan bahwa:

*“Unit-unit usaha yang kami kelola atau jalankan sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Dusun Dalam, misalnya pemberian modal berusaha pada unit usah simpan pinjam. Demikian juga unit usaha lainnya, baik itu Alsintan, Perbengkelan, Penyaluran Saprodi, maupun Bank Sampah, yang bermanfaat bagi masyarakat untuk lapangan kerja. Dengan cara-cara ini, akan meningkatkan penghasilan bulanan, yang- secara langsung dapat pula meningkatkan ekonomi dan kesejahteraanya”.*<sup>12</sup>

Kesuksesan unit-unit usaha BUMDes Karya Dermawan di atas, juga dibenarkan oleh bapak A.H bahwa;

*“Perkembangan unit usaha BUMDes Karya Dermawan dari tahun ketahun mampu memberikan sumbangan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada tahun 2014 BUMDes menyumbang sebanyak Rp. 16.000.000, dan tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 26.000.000, serta tahun 2016-2017 terjadi peningkatan peningkatan PADes sebesar Rp. 120.000.00. Dengan adanya PADes, menjadi pemasok bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Dusun Dalam”.*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>S.R (Ketua BUMDes Karya Dermawan). "Interview 10 Desember 2021, Desa Dusun Dalam.

<sup>13</sup>A.N (Kepala Desa Dusun Dalam). "Interview 10 Desember 2021, Desa Dusun Dalam.

M. Fauzi et al dalam penelitiannya membuktikan bahwa unit-unit usaha BUMDes Karya Dermawan mampu meningkatkan pendapatan bulanan masyarakat penerima manfaat. Terjadinya peningkatan-pendapatan masyarakat penerima manfaat, secara langsung tercapitalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraanya.<sup>14</sup>

BUMDes Karya Dermawan umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Dalam yang ekonominya lemah, seperti katagori Keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS 1).<sup>15</sup> Katagori KPS dan KS 1 merupakan rumusan yang dibuat oleh BKKBN. Kedua katagori tersebut, diartikan sebagai tingkat kesejahteraan keluarga yang paling bawah rendah. Jika keluarga mampu melewati kedua katagori tersebut, maka tingkatnya berubah menjadi katagori KS 2, dan seterusnya sampai pada KS 3 dan KS 3 Plus. Definisi yang disematkan pada KPS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi indikator KS 1 atau indikator kebutuhan dasar (*Basic Needs*) secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan. Sementara KS I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis (*Social - Psychological Needs*), seperti kondisi pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal.<sup>16</sup>

Dalam laporan Dusun Dalam tahun 2018 – 2021, dijelaskan kesejahteraan pada katagori KPS dan KS 1 makin berkurang jumlahnya. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1 berikut:

---

<sup>14</sup>Muhammad Fauzi et al, “Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village”....

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup>Bappenas, Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)....



**Tabel 1.**  
**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dusun Dalam Dari Tahun 2018 – 2021**

Katagori	2018		2019		2020		2021	
	Total	Persen	Total	Persen	Total	Persen	Total	Persen
KPS	104	29 %	104	29 %	81	23 %	69	19 %
KS 1	88	32 %	77	28 %	59	21 %	54	19 %

Sumber: Dokumentasi Dusun Dalam

Berdasarkan tabel di atas, katagori KPS hanya pada tahun 2018 – 2019 yang belum berkurang jumlah persentasenya, yaitu 104 (29%) KPS. Masuk pada tahun 2020 berkurang menjadi 81 (23%) KPS → dari 104 (29 %) KPS tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 berkurang menjadi 69 (19 %) KPS → dari 81 (23 %) KPS tahun 2020. Demikian juga pada KS 1, memperlihatkan pengurangan yang signifikan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 88 (32 %) KS 1. Masuk pada tahun 2019 berkurang menjadi 77 (28 %) KS 1 → dari 88 (32 %) KS 1 tahun 2018. Lanjut pada tahun 2020 berkurang menjadi 59 (21 %) → dari 77 (28 %) KS 1 tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 berkurang menjadi 54 (19 %) KS 1 → dari 59 (21 %) tahun 2020. Dengan demikian, angka persentase katagori KPS maupun KS 1 tersebut, tampak semakin terus berkurang dari tahun 2018 – 2021. Ini berarti, keluarga yang dulunya dalam katagori KPS maupun KS 1 sudah masuk pada tingkat kesejahteraan berikutnya, sesuai yang dirumuskan oleh BKKBN. Pendek kata, semakin berkurang angka persentase tersebut menandakan terjadinya peningkatan kesejahteraan pada KPS maupun KS 1.

Pembuktian data di atas, lebih menekan dimensi kebutuhan materil dalam menilai kesejahteraan masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan. Studi yang dilakukan oleh M. Fauzi et al menekankan perlu adanya pengembangan (gagasan dan ide) dalam menilai kesejahteraan masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan kedepanya.<sup>17</sup> Umumnya mereka termasuk dalam ekonomi lemah atau kesejahteraan tergolong rendah, tapi setelah berdirinya BUMDes Karya Dermawan mampu merubah hal tersebut.<sup>18</sup> Menariknya lagi, mayoritas dari mereka adalah beragama Islam. Kesejahteraan mereka yang hanya dinilai pada dari dimensi kebutuhan materil, perlu dipertanyakan kembali?. Karena ada dimensi kebutuhan lain yang lebih perlu dalam menilai kesejahteraan mereka, yaitu apakah sudah memiliki atau mampu memenuhi dimensi kebutuhan spritual?.

Penelitian ini bertujuan menilai kesejahteraan masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan dalam ekonomi Islam. Menilai kesejahteraan dalam ekonomi Islam, dilihat dari dimensi kebutuhan materil dan spritual. Dalam dimensi kebutuhan spritual mempergunakan gagasan/indikator *Maqasid Syariah*, dan dimensi kebutuhan materil mempergunakan gagasan/indikator Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

---

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Ibid.

## Kajian Pustaka

BUMDes adalah usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa (dapat didirikan satu desa / secara bersama-sama oleh dua desa atau lebih) dan berbadan hukum, dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Dalam mengelola BUMDes prinsip yang harus (wajib) ada, yaitu teguh kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif. Hal tersebut supaya BUMDes dapat terarah dengan baik atau berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam menjalankan unit-unit usahanya, baik unit usaha yang dijalankan berorientasi ekonomis (komersial) maupun pelayanan umum (sosial) sebesar-besarnya untuk perokonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>19</sup>

Banyak penelitian yang mengungkapkan signifikansi BUMDes terhadap kesejahteraan. Penelitian tersebut dilakukan antara lain M. Fauzi et al,<sup>20</sup> A. D. Huruta et al,<sup>21</sup> A. A. Alfirdausi & G. Riyanto,<sup>22</sup> I. Kania et al,<sup>23</sup> J. A. Nurhasan & A. H. Munawar,<sup>24</sup> Z. Ridlwan,<sup>25</sup> B.- Sudaryana,<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup>Gagasan BUMDes di atas, penulis rujuk dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.; UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.; PP No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.; PERMENDes PDTT No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa...; PERMENDes PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama....

<sup>20</sup>Muhammad Fauzi et al, "Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village"....

<sup>21</sup>A.D. Huruta et al, "The Development of Village-Owned Enterprises: Lessons Learned from Ponggok Village"....

<sup>22</sup>A. A. Alfirdausi & G. Riyanto, "The Role Of Village Owned Enterprises (BUMDes) On Efforts To Increase Original Village Income (PADES) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency)".....

<sup>23</sup>I. Kania et al, "A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Village-Owned Enterprises in Indonesia"....

A. Tjoetra et al,<sup>27</sup> S. E. Winarti et al<sup>28</sup>. Secara umum mereka melihat BUMDes memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat desa melalui unit-unit usaha yang dibangun atau dijalankan. Melalui unit usaha BUMDes tersebut, kebutuhan semacam materil maupun non materil dapat dicapai oleh masyarakat desa.

Dalam konteks modern, kesejahteraan didefinisikan suatu kondisi individu atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>29</sup>

Secara nasional, kesejahteraan dipandang dari kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup>J. A. Nurhasan & A.H. Munawar, “Efektivitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu”.....

<sup>25</sup>Z. Ridlwan, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa”.....

<sup>26</sup>B. Sudaryana, “The Model Of Development Policy Implementation Village Owned Enterprises In Indonesia”.....

<sup>27</sup>A. Tjoetra et al, “Community Poverty Reduction Strategies through a Village-Owned Enterprise in Kampung Belakang Village, West Aceh Regency”....

<sup>28</sup>S. E Winarti et al, “Pemberdayaan Kelompok Perempuan Menggunakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.”

<sup>29</sup>A. B. Dograwa, “Islamic Social Welfare and The Role of Zakah in the Family System,” In Munich Personal RePec Archive (MPRA). University Zaria-Nigeria, 2010.

<sup>30</sup> Lihat dalam uraian pada pasal 1 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dari studi awal terhadap masalah menilai sejahteranya masyarakat, sudah terjawab bahwa *Compatibilty* gagasan *Islamic Economic Welfare* memberikan kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan gagasan *Conventional Economic Welfare*.<sup>31</sup> Walaupun para pencetus (ekonom konvensional) gagasan *Conventional Economic Welfare*, sempat menuduh pencetus (ekonom Islam) gagasan *Islamic Economic Welfare* sebagai penghambat dan penghalang dalam mempelajari kesejahteraan, tetapi tuduhan itu hanya menunjukkan ruang-ruang kosong dari apa yang dirumuskan<sup>32</sup>.

Dalam gagasan *Conventional Economic Welfare*, tampak jalan buntu yang hanya memfokuskan untuk mengejar kesejahteraan dunia saja. Hasil akhir menilai sejahteranya suatu masyarakat mendasarkan pada dimensi kebutuhan materil. Bila kebutuhan semacam materil terpenuhi, secara langsung terciptalah kebahagiaan hidup (*Happiness of Life*) didunia yang lebih baik.<sup>33</sup> Lanjut dari itu, bila dilihat indikator yang dirumuskan pada dimensi kebutuhan materil selalu mengalami penyempurnaan. Hal ini bisa dilihat, dari rumusan *Product Domestik Buruto* (PDB), rumusan

---

<sup>31</sup>Abdul Husain Muhammad, *Economic System in Islam: Compared with Capitalism and Socialism*; Masudul Alam Choudhury & Uzir Abdul Malik, *The Foundations of Islamic Political Economy*.

<sup>32</sup>Aminah, "Maqhasid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerpan Dalam Ekonomi Islam"....; Puspardini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)"....

<sup>33</sup>A. C. Pigou, *The Economic of Welfare*....; M. Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*....; V. Pareto, *Manual of Political Economy*....; N. Barry, *Welfare*....; I. Kucukaksoy, "Adam Smith's Conceptual Contributions to International Economics: Based on the Wealth of Nations,"....; M. Albert & R. Hahnel, *Quiet Revolution in Welfare Economics*....; R. A. McCain, *Welfare Economics: An Interpretive History*....

*Net Economic Welfare* (NEW), rumusan *Basic Need Approach*, dan rumusan *Human Development Index* (HDI).<sup>34</sup>

Dalam kaca mata nasional, rumusan indikator kesejahteraan juga menempatkan porsi dimensi kebutuhan materil lebih utama, agaknya dimensi kebutuhan spiritual mendapatkan porsi yang lebih sedikit, seperti yang dirumuskan BKKBN membagi 3 (tiga) dalam pemenuhan kebutuhan, yaitu pertama kebutuhan dasar (*Basic Needs*) terdiri dari pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kedua kebutuhan sosial psikologis (*Social Psychological Needs*) terdiri dari kondisi pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal. Ketiga kebutuhan pengembangan (*Development Needs*) terdiri dari kemampuan menabung, pendidikan khusus, akses terhadap informasi. Semua rumusan ini, dibagi dalam 5 (lima) tahap antara lain Keluarga Prasejahtera (KPS);, Keluarga Sejahtera 1 (KS-1);, Keluarga Sejahtera 2 (KS-2);, Keluarga Sejahtera 3 (KS-3), dan Keluarga Sejahtera 3 Plus (KS-3P).<sup>35</sup>

Berbeda dengan gagasan *Islamic Economic Welfare*, orientasinya tidak hanya kesejahteraan dunia semata, tapi lebih berorientasi mengejar kesejahteraan akhirat.<sup>36</sup> Sejahteranya masyarakat dinilai dari dimensi kebutuhan materil dan spritual sehingga terciptalah *Happiness of Life* dunia dan akhirat (*Falah*). Dua dimensi tersebut, diperhatikan secara

---

<sup>34</sup>L. Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*; S. Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan,....*

<sup>35</sup>Bappenas, *Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)....*

<sup>36</sup> Cendra, et al. "The Effect of Income with Household Consumption on The Welfare of Dodol Potato Businesses Assessed From Islamic Economic Concept." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2020): 81-93; Nopita Sari, et al. "Pengaruh Harga Kayu Manis Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Aspek Religiusitas." *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 7, No. 2 (2021): 188-203;

seimbang, agar terciptanya pribadi yang utuh (Insan Kamil), dengan mengajarkan membangun dunia yang baik dan mengajarkan untuk mengejar akhirat yang lebih utama, karena kehidupan dunia sebagai fungsi kehidupan akhirat.<sup>37</sup>

Rumusan indikator untuk dimensi kebutuhan materil dan spritual (*Falah*), mengacu pada tujuan syariat (*Maqasid Syariah*).<sup>38</sup> *Maqasid Syariah* adalah tujuan ditetapkan hukum Islam atau peraturan syariah, baik itu berupa perintah maupun larangan.<sup>39</sup> Ekonom Islam sepakat bahwa gagasan *Maqasid Syariah* sebagai sistem nilai yang menjadi prinsip pencapaian kesejahteraan.<sup>40</sup> Pengimplemtasian *Maqasid Syariah* sebagai prinsip pencapai kesejahteraan harus menjaga 5 (lima) unsur pokok, yaitu *pertama* menjaga agama (*Hifdzu Din*). *Kedua* menjaga jiwa (*Hifdzu Nafs*). *Ketiga* menjaga akal (*Hifdzu 'Aql*). *Keempat* menjaga keturunan

---

<sup>37</sup>K. Ahmad, *Studies In Islamic Economic...*; Y. Al-Qaradhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlak Fi Al-Iqtishad Al-Islami...*; Hossein Askari et al, *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application...*; M. U. Chapra, *Islam and The Economic Challenge...*; H. Furqani & M. A. Haneef, "Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward"....; Khan, *An Introduction to Islamic Economics...*; M. A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice A Comperative Study...*

<sup>38</sup>Aminah, "Maqhasid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerpan Dalam Ekonomi Islam"....; Puspardini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)"....

<sup>39</sup>J. Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophi of Islamic Law A System Approach* (London: International Institut of Islamic Thought, 2007); M.U Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqasid Al-Shari'ah...*

<sup>40</sup>K. Ahmad, *Studies In Islamic Economic...*; Y. Al-Qaradhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlak Fi Al-Iqtishad Al-Islami...*; Hossein Askari et al, *Introduction to Islamic Economics...: Theory and Application*; M. U. Chapra, *Islam and The Economic Challenge*; H. Furqani & M. A. Haneef, "Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward"....; Khan, *An Introduction to Islamic Economics...*; M. A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice A Comperative Study...*

(*Hifdzu Nasl*). Kelima menjaga harta (*Hifdzu Maal*).<sup>41</sup> Lima unsur pokok ini, masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Karena setiap urgensinya dibedakan atau terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu pertama tujuan primer (*Dharuriyah*). Kedua tujuan skunder (*Hajiyah*). Ketiga tujuan tersier (*Tahsiniah*). Tiga tingkatan ini tujuan primer yang harus diperhatikan, karena rusaknya tujuan primer justru akan menjadi rusak pula pada tingkatan skunder dan tersier.<sup>42</sup>

## Metode

Penelitian yang dilakukan pada BUMDes Karya Dermawan, Dusun Dalam, Kec. Siulak, Kab. Kerinci, Prov. Jambi termasuk *Field Research* (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian adalah *Mixed Method* (gabungan kualitatif dan kuantitatif), dengan desain yang dipergunakan berupa strategi *Concurrent Mixed Method* (menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu yang sama).<sup>43</sup> Populasi penelitian adalah masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan sebanyak 350 Kepala Keluarga (KK). Sekian banyak populasi ini, penulis membatasinya untuk dijadikan sampel, yang dilakukan pengambilannya secara kualitatif dan kualitatif. Pada pengambilan sampel

---

<sup>41</sup>Imana, “Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari’ah Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 Dan 2014- 2016)”...; Ismail, “Kesejahteraan Petani Jagung Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah (Studi Di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus)”...; Rinawati, “Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatipark 2 Kota Batu Dalam Prespektif Maqashid Syariah”...; Renny Oktafia, “Waste Bank And Community Welfare In Sidoarjo (Maqashid Sharia Perspective)”...

<sup>42</sup>Aminah, “Maqhasid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerpan Dalam Ekonomi Islam”...; Pusparini, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”....

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017).



kuantitatif menggunakan metode *Purposive Sampling* dan dihitung menggunakan teknik “*Slovin*” sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK).<sup>44</sup> Sementara pengambilan sampel kualitatif, menggunakan metode *Snowball Sampling*, yang diperoleh sebanyak 6 Kepala Keluarga (KK).<sup>45</sup>

Penelitian ini mempergunakan dua jenis sumber, yaitu *pertama* sumber data skunder dikumpul dari tulisan-tulisan penunjang yang sesuai dengan tema penelitian berupa buku, jurnal, dan dokumentasi. *Kedua* sumber data primer, yang dikumpul secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang diisi oleh reponden dan sudah dirancang dengan ketentuan skala *Guttman* (tabel 2, 3, 4), disertai obseravasi dan wawancara.<sup>46</sup> Data primer yang telah terkumpul, di analisis dengan mempergunakan metode analisis deskriptif, dengan *IBM-SPSS* sebagai alat bantu untuk pengolahanya.<sup>47</sup>

**Tabel 2.**  
**Kisi-kisi Instrument**

<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Skala</b>
Kebutuhan	Kebutuhan Dasar ( <i>Basic Needs</i> ), dinilai dari ketercapaian pangan, sandang, papan dan kesehatan	<i>Guttman</i>
	Kebutuhan Sosial Psikologis ( <i>Social Psychological Needs</i> ), dinilai dari ketercapaian kondisi pendidikan,	

<sup>44</sup>Jumlah sampel di atas, penulis hitung dengan metode Slovin, dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5% atau 0,05. Lihat dalam M. P. Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006); V. Wiratna Sujarweni, *Statiska Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 81; A. M Yusuf, *Metodologi Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah* (Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2005), 186.

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*; A. M Yusuf, *Metodologi Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah...*

<sup>47</sup>A. Field, *Discovering Statistics Using SPSS* (London: SAGE Publications, 2009); Nuryadi et al, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Gramasurya, 2017).

Indikator	Sub Indikator	Skala
Materil	rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal Kebutuhan Pengembangan ( <i>Development Needs</i> ), dinilai dari ketercapaian dalam kemampuan menabung, pendidikan khusus, akses terhadap informasi	
Kebutuhan Spritual	Menjaga Agama ( <i>Hifdzu Din</i> ), dinilai dari implementasi rukun islam dan mempercayai rukun iman.	Gutman
	Menjaga Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> ), dinilai dari pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan.	
	Menjaga Akal ( <i>Hifdzu 'Aql</i> ), dinilai dari menuntut ilmu pengetahuan, baik melalui lembaga melalui pendidikan (formal, nonformal, informal), pelatihan, pengembangan, dan sumber-sumber media informasi.	
	Menjaga Keturunan ( <i>Hifdzu Nasl</i> ) dinilai dari permulaan pernikahan secara sah menurut syariat dan negara, dan mengatasi penjagaan keluarga dari aksi-aksi lingkungan yang mangancam, serta memperhatikan keturunan (anak) dengan cara mendidik	
	Menjaga Harta ( <i>Hifdzu Al-Maal</i> ) dinilai dari memperoleh harta, penggunaan, dan mampu mendistribusikan (zakat, sedekah, infaq) kepada masyarakat di sekelilingnya	

Sumber: Diambil dari sejumlah literatur meliputi Bappenas (2010), K. Ahmad (1980), Hossein Askari et al (2015), M.U Chapra, (1992 & 2008); Khan (1994), M.A. Manan, (1988), Imana (2017), Ismail (2018), dan I. Rinawati (2018).

## Hasil dan Pembahasan

### Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan Pada Dimensi Kebutuhan Materil

Hasil ketercapaian dimensi kebutuhan materil meliputi kebutuhan dasar (*Basic Needs*), kebutuhan sosial psikologis (*Social Psychological Needs*), kebutuhan pengembangan (*Development Needs*) menunjukan bahwa masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan sudah mampu memenuhinya. Hal ini bisa dilihat dari penjabaran pada tabel 3 (tiga) berikut:

**Tabel 3.**  
**Hasil Pencapaian Indikator Kebutuhan Materil Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan**

Indikator	Item	Jawaban	
		Ya	Tidak
Kebutuhan Dasar (Basic Needs)	Keluarga makan 2 (dua) sehari atau lebih	100	0
	Keluarga mengkonsumsi telur, ikan, daging minimal 1 (satu) kali dalam seminggu	100	0
	Keluarga memiliki pakaian untuk kegiatan yang berbeda	95	5
	Keluarga membeli minimal 1 (satu) pasang pakaian dalam setahun	95	5
	Status hak milik rumah yang ditempati milik sendiri	85	15
	Kondisi rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dinding, serta MCK	85	15
	Keluarga dalam keadaan sehat dalam 3 (tiga) bulan terakhir	90	10
	Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan	100	0
Kebutuhan Sosial Psikologis (Social Psychological Needs)	Keluarga dalam keadaan damai, saling menyayangi, dan berkomunikasi	100	0
	Keluarga makan bersama seminggu sekali atau lebih	90	10
	Pendidikan keluarga mencapai 12 tahun wajib belajar	80	20
	Keluarga hidup rukun dimasyarakat	100	0
	Keluarga ikut atau sering membantu sumbangan materil dalam kegiatan sosial	85	15
	Ada keluarga yang aktif sebagai pengurus sosial/yayasan/ institusi masyarakat	10	90
	Keluarga beribadah dengan nyaman (baik), dan dapat meningkatkan pengetahuan agama.	100	0
Kebutuhan Pengembangan (Development Needs)	Salah satu anggota keluarga ada yang bekerja untuk memperoleh penghasilan	100	0
	Penghasilan yang diperoleh dapat ditabung sebagai jaminan dimasa yang akan datang	95	5
	Keluarga dapat memperoleh informasi dari masyarakat dan sumber media	95	5
	Keluarga ada yang menempuh pendidikan tinggi (kulia)	35	65

<b>Total</b>	<b>1.640</b>	<b>260</b>
<b>Persentase</b>	<b>86,31</b>	<b>13,68</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>

Sumber: Data Primer Diolah

Pada tabel di atas, tampak bahwa masyarakat penerima manfaat BUMDes banyak yang menjawab kuesioner dengan pilihan jawaban “ya”, dibandingkan dengan pilihan jawaban “tidak”. Nilai rata-rata yang menjawab “ya” tercatat sebanyak 1.640 atau persentasenya sebesar 86,31 %, sedangkan nilai rata-rata yang menjawab “tidak” tercatat sebanyak 260 atau persentasenya 13,68 %.

Kesejahteraan ekonomi Islam (*Islamic Economic Welfare*) merumuskan dimensi kebutuhan materil sesuai dengan ajaran Islam, baik pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.<sup>48</sup> Dalam hal ini, kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki kesesuaian yang dirumuskan oleh BKKBN, tapi secara faktual yang dirumuskan BKKBN itu ukurannya bersifat universal, karena di Negara Indonesia memiliki ragam agama.<sup>49</sup>

Terhadap pengujian rumusan dari BKKBN di atas, bila ditelusuri hasil jawaban masyarakat penerima manfaat BUMDes terdapat beberapa dimensi kebutuhan yang belum terpenuhi. Namun masyarakat penerima manfaat BUMDes mengakui dengan hadirnya BUMDes Karya Dermawan membantu mereka menambah penghasilan (pendapatan), sehingga

<sup>48</sup>K. Ahmad, *Studies In Islamic Economic...*; Y. Al-Qaradhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islami...*; Hossein Askari et al , *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application...*; M. U. Chapra, *Islam and The Economic Challenge...*; H. Furqani & M. A. Haneef, “Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward”...; Khan, *An Introduction to Islamic Economics...*; M. A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice A Comperative Study...*

<sup>49</sup>Bappenas, *Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)...*

kebutuhan semacam materil dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilihat hasil Interview dengan bapak A.Z yang mengungkapkan bahwa:

*“Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, saya harus memiliki penghasilan yang memadai. Melalui pekerjaan saya sebagai petani sawah, dan disertai saya diajak oleh pengelola BUMDes untuk bekerja pada unit usaha Alsintan, yang gajinya diberi per 3 (tiga) bulan, Alhamdulillah perolehan penghasilan terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, pendidikan anak, rumah, dan juga kesehatan”.*<sup>50</sup>

Ungkapan bapak A.Z menunjukkan bahwa dengan adanya BUMDes dapat membantu menambah penghasilan yang secara langsung dapat memberikan kontribusi bagi kebutuhan materil keluarganya, baik kebutuhan dasar, psikologis maupun pengembangan. Hanya saja, beberapa dimensi-dimensi belum tercapai. Hal ini penulis lihat pada saat observasi, seperti rumah yang dihuni fasilitas MCK belum memadai, dan pendidikan anak belum ada yang menempuh pendidikan tinggi (kuliah) yang mana setelah lulus Madarasah Aliyah Negeri (MAN) anak-anak lebih memprioritas keinginan bekerja untuk menolong orang tuanya, serta tidak satupun anggota yang ikut menjabat semacam sebagai pengurus kegiatan sosial.<sup>51</sup>

Disamping itu, pasangan suami istri bapak A.S dengan ibuk E.R mengungkapkan bahwa:

*“Kami saling bekerja sama untuk mencari penghasilan dari hasil ladang disertai warung kecil yang semulanya diberikan modal oleh pihak BUMDes. Dengan kerja sama mencari penghasilan, serasa kebutuhan serasanya cukup, seperti makan kadang 2 (dua) atau 3 (tiga) tiga kali sehari, tapi untuk makan ikan maupun*

---

<sup>50</sup>A.Z (Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). Interview 18 Desember 2021, Desa Dusun Dalam.

<sup>51</sup>Observasi 18 Desember 2021, Di Kediaman Rumah Bapak A.Z Desa Dusun Dalam.

*daging ayam maupun sapi tidak harus setiap hari. Soal pakaian keluarga, serasanya cukup untuk kegiatan-kegiatan tertentu, dan juga belanja pakaian 1 (satu) kali setahun pada waktu lebaran Idul Fitri, dan pakaian yang kami beli tidak lah mahal yang penting menutup aurat sesuai dengan anjuran agama. Soal pendidikan, anak saya masih SMP, mudahan pendidikanya tetap berlanjut sampai kuliah. Soal kesehatan, kami sekeluarga dalam keadaan sehat, tetapi kami selalu berupaya penjagaanya baik segi makanan yang dikonsumsi maupun kebersihan lingkungan”.*<sup>52</sup>

Melihat ungkapan pasangan suami istri di atas, tampak bahwa persoalan untuk memenuhi kebutuhan materil keluarga harus saling bekerja sama dalam mengumpulkan penghasilan (pendapatan). Penghasilan sang suami yang diperoleh dari hasil (ladang), dan sang istri diperoleh dari usaha Warung Kecil yang modal usahanya diberikan oleh pihak BUMDes Karya Dermawan sehingga kebutuhan semacam makan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Namun demikian, observasi dilakukan terdapat berberapa dimensi kebutuhan materil yang belum mampu terpenuhi meliputi belum memiliki rumah, anggota keluarga tidak ada yang menjabat semacam sebagai pengurus kegiatan sosial, dan pendidikan anak belum ada yang kuliah.<sup>53</sup>

Kemudian bapak P.A juga mempertegaskan bahwa modal usaha yang diberikan oleh pihak BUMDes Karya Dermawan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan bulananya, sehingga secara langsung kebutahn kebutuhan dasar, psikologis maupun pengembangan. Berikut dapat dilihat ungkapan beliau:

*“Pihak BUMDes memberikan modal untuk usaha dagang (Warung Kecil) saya dapat menmbah penghasilan bulanan saya,*

---

<sup>52</sup>A.S & E.R, Pasangan Suami Istri (Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). "Interview 18 Desember 2021, Desa Dusun Dalam.

<sup>53</sup>Observasi 19 Desember 2021, Dikedaiaman Pasangan Suami Istri BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam.

*sehingga saya dapat dipergunakan memenuhi kebutuhan keluarga, seperti makan sekeluarga lebih kurang 3 (tiga) kali sehari, dan kami sekeluarga mengkonsumsi makanan yang bervariasi setaipa harinya yang ukuran gizi dan protein sesuai 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna. Persoalan pakaian, lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tig) kali setahun kami sekeluarga membelinya. Persoalan pendidikan, anak pertama sudah lulus kuliah S1, dan anak kedua masih menduduki bangku MTs. Persolan kesehatan, secara teratur kami terapkan hidup sehat, baik dari segi makanan, kebersihan, dan lainnya. Persoalan kepemilikan rumah, adalah milik pribadi, dan fasilitas juga cukup memadai. Selain itu, saya juga ikut menjabat sebagai ketua kelompok tani, dan juga tidak luput pula persoalan kegiatan kemasyarakatan (sosial), kami sekelurga tetap ikut membantu sesuai dengan kemampuan, baik tenaga maupun moril”.*<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil data kuantitatif dan kualitatif diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan sudah mampu memenuhi dimensi kebutuhan materil, baik kebutuhan dasar, psikologis maupun pengembangan. Walaupun terdapat sebagian dimensi-dimensi yang belum terpenuhi, tapi secara pengukruan yang dirumsukan indikator oleh BKKBN sudah termasuk dalam katagori keluarga sejahtera tahap III.<sup>55</sup>

### **Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Pada Dimensi Kebutuhan Spritual**

Hasil ketercapaian indiktor kebutuahan spritual meliputi menjaga agama (*Hifdzu Din*), menjaga jiwa (*Hifdzu Nafs*), menjaga akal (*Hifdzu 'Aql*), menjaga keturunan (*Hifdzu Nasl*), dan menjaga harta (*Hifdzu*

---

<sup>54</sup>P.A (Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). "Interview 25 Desember 2021, Desa Dusun Dalam.

<sup>55</sup>Bappenas, Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)...

*Maal*) menunjukan bahwa masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan sudah mampu menjaga atau memenuhinya. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4 (empat) berikut:

**Tabel 4.**  
**Hasil Pencapaian Indikator Kebutuhan Spritual Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan**

Indikator	Item	Jawaban	
		Ya	Tidak
Menjaga Agama ( <i>Hifdzu Din</i> )	Keluarga beriman kepada Allah SWT, Malaikat, Kitab, Nabi dan Rasul, Hari Akhir, dan percaya qadha dan qadar	100	0
	Keluarga menunaikan ibadah sholat fardhu (wajib) 5 (lima) waktu sehari semalam	100	0
	Keluarga menunaikan ibadah zakat sesuai nisabnya	100	0
	Keluarga menunaikan ibadah puasa fardhu (wajib)	100	0
	Keluarga mampu menunaikan ibadah haji	10	90
Menjaga Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> )	Keluarga mengkonsumsi makanan yang halal	100	0
	Keluarga mengkonsumsi makanan yang memenuhi ukuran gizi dan protein sesuai 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna	100	0
	Keluarga rutin menjaga kebersihan diri	90	10
	Keluarga rutin menjaga kebersihan lingkungan	60	40
Menjaga Akal ( <i>Hifdzu 'Aql</i> )	Keluarga mempelajari ilmu agama Islam, baik tempat pengajian, sekolah berbasis agama Islam, dan melalui sumber media tv, dan internet	100	0
	Keluarga dapat mengembangkan atau mengimplementasi pengetahuan agama Islam yang diperoleh kedalam kehidupan sehari-hari	100	0
	Keluarga yang terbentuk atau terlahir dari pernikahan secara sah menurut syariat Islam maupun negara	100	0
Menjaga Keturunan ( <i>Hifdzu Nasl</i> )	Keluarga mampu mewujudkan keluarga yang lebih harmonis	100	0
	Keluarga mampu mencegah dari setiap pergerakan lingkungan sosial yang mengancam kehidupan dan keutuhan keluarga	100	0
	Harta yang dimiliki keluarga diperoleh dengan yang cara halal	100	0
Menjaga Harta ( <i>Hifdzu Maal</i> )	Keluarga mempergunakan hartanya untuk hal-hal yang halal	100	0



Keluarga memberikan infak, sedekah dari harta yang dimiliki dalam setiap kesempatan yang ada	100	0
<b>Total</b>	<b>1560</b>	<b>140</b>
<b>Persentase</b>	<b>91,76</b>	<b>8,23</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>

Sumber: Data Primer Diolah

Pada tabel di atas, tampak bahwa masyarakat penerima manfaat BUMDes banyak yang menjawab kuesioner dengan pilihan jawaban “ya”, dibandingkan dengan pilihan jawaban “tidak”. Nilai rata-rata yang menjawab “ya” tercatat sebanyak 1.560 atau persentasenya sebesar 91,76 %, sedangkan nilai rata-rata yang menjawab “tidak” tercatat sebanyak 140 atau persentasenya 8,23 %.

Kesejahteraan ekonomi Islam (Islamic Economic Welfare) meletakkan *Hifdzu Din* adalah kebutuhan paling tinggi (utama) dalam menilai sejahteranya masyarakat.<sup>56</sup> Kesesuaian (*Compatibilty*) *Hifdzu Din* sebagai prinsip sejahteranya suatu masyarakat, dapat dilihat bagaimana mengaplikasikan rukun Iman dan Islam.<sup>57</sup> Kedua rukun ini,

<sup>56</sup>K. Ahmad, *Studies In Islamic Economic...*; Y. Al-Qaradhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlak Fi Al-Iqtishad Al-Islami...*; Hossein Askari et al , *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application...*; M. U. Chapra, *Islam and The Economic Challenge...*; H. Furqani & M. A. Haneef, “Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward”...; Khan, *An Introduction to Islamic Economics...*; M. A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice A Comperative Study...*

<sup>57</sup>Imana, “Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari’ah Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 Dan 2014- 2016”...; Ismail, “Kesejahteraan Petani Jagung Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah (Studi Di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)”...; Rinawati, “Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatipark 2 Kota Batu Dalam Prespektif Maqashid Syariah”...

pilar dan pondasi dalam agama Islam, yang didalamnya memuat nilai-nilai ketauhidan, keimanan, dan aspek lainnya yang disyariatkan.<sup>58</sup>

Terhadap masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan, terbukti *Hifdzu Din* selalu dilkasakan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari ungakpan mereka melalui Interview, seperti yang diungkapkan oleh bapak P.A ;

*“Alhamdulillah saya dan keluarga selalu tetap beriman sebagaimana yang telah diuraikan dalam rukun iman yang 6 (enam) itu. Dan tetap melaksanakan rukun Islam, dimulai bershadat, sholat fardhu 5 (lima) waktu sehari semalam yang kadang dilakukan secara berjamaah (masjid) dan kadang sendiri di rumah, puasa fardhu bulan ramadhan tapi pada puasa sunnah tidak semua dilakukan oleh anggota keluarga, serta memberikan zakat (fitrah dan mall), dan untuk haji saya sudah melaksankanya bersama istri”.*<sup>59</sup>

Tidak jauh berbeda dengan diungkapkan oleh pasangan suami istri bapak A.S dengan ibuk E.R yang mengungkapkan bahwa:

*“Sebagai umat Islam, kami tetap mentaati aturan dan perintah sesuai dalam anjuran agama Islam, seperti beriman sesuai dengan ketentuan rukun iman yang 6 (enam), dan melaksanakan tuntutan yang ada pada rukun Islam yang 5 (lima) bersyahadat, sholat wajib, puasa wajib dan zakat, kecuali haji kami belum melaksanakan karena belum ada dukungan yang lebih dari materi yang kami punya”.*<sup>60</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak A.Z yang mengungkapkan bahwa:

---

<sup>58</sup>J. Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophi of Islamic Law A System Approach*; M.U Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqasid Al-Shari’ah*.

<sup>59</sup>P.A (Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). "Interview 06 Januari 2022, Desa Dusun Dalam.

<sup>60</sup>A.S & E.R, Pasangan Suami Istri (Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). "Interview 06 Januari 2022, Desa Dusun Dalam.

*“Saya dan anggota keluarga, semua sudah kami laksanakan baik didalam rukun Iman maupun rukun Islam syahadat, sholat, puasa dan zakat, kecuali haji belum cukup saku melaksanakannya, tetapi InsyaAllah bila sakunya mencukupi tetap melaksanakannya”*.<sup>61</sup>

Dari hasil Interview di atas, tampak bahwa hal-hal yang dilakukan masyarakat penerima manfaat dalam *Hifdzu* Din adalah melaksanakan rukun Iman dan rukun Islam. Hanya saja dalam pelaksanaan rukun Islam pada point pelaksanaan ibadah haji belum berkemampuan secara materi. Hal ini bukanlah menjadi fatal, bila tidak menunaikan ibadah haji, karena Islam mengatur ibadah haji ditunai bagi orang-orang yang sudah mampu secara materi maupun fisik (Q.S. Ali Imran. 3 : 97).

*Islamic Economic welfare* juga meletakkan *Hifdzu Nafs*, *Hifdzu ‘Aql*, *Hifdzu Nasl*, dan *Hifdzu Maal* sebagai prinsip dalam menilai sejahteranya masyarakat.<sup>62</sup> Dalam *Hifdzu Nafs* bisa dilihat, bagaimana kejelasan dari papan, sandang, papan, kesehatan. *Hifdzu ‘Aql* bisa dilihat, bagaimana masyarakat menuntut ilmu pengetahuan melalui lembaga pendidikan, latihan, pengembangan, dan media. *Hifdzu Nasl* bisa dilihat, bagaimana masyarakat menjaga garis keturunan dengan pernikahan yang sah menurut agama dan negara, membangun keluarga yang harmonis, dan

---

<sup>61</sup>A.Z (Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). Interview 06 Januari 2022, Desa Dusun Dalam.

<sup>62</sup>K. Ahmad, *Studies In Islamic Economic..*; Y. Al-Qaradhwai, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlak Fi Al-Iqtishad Al-Islami...*; Hossein Askari et al , *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application...*; M. U. Chapra, *Islam and The Economic Challenge...*; H. Furqani & M. A. Haneef, “*Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward*”...; Khan, *An Introduction to Islamic Economics...*; M. A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice A Comperative Study...*; J. Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophi of Islamic Law A System Approach...*; M.U Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqasid Al-Shari’ah...*

mencegah aksi-aksi lingkungan sosial yang mengancam. Terakhir *Hifdzu Maal* bisa dilihat, bagaimana cara memperoleh, mempergunakan, dan mendistribusikannya.<sup>63</sup>

Pembuktian masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan terhadap *Hifdzu Nafs*, *Hifdzu 'Aql*, *Hifdzu Nasl*, dan *Hifdzu Maal* selalu dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan syariat Islam. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan mereka melalui Interview, seperti yang diungkapkan oleh bapak A.Z:

*“Kalau persoalan makanan saya dan keluarga cukup sederhana, bergizi dan jelas kehalalannya. Persoalan kesehatan, Alhamdulillah keluarga saya tetap hidup bersih baik dalam maupun luar rumah. Persolan menambah wawasan agama dan umum, sudah dilkasakan secara baik, sepert mengkitu pengajian yang dilakukan 3 (tiga) kali seminggu ditempat pengajian, juga untuk anak-anak selepas menimba ilmu pengethuan disekolah sorenya kami dorong lanjut menimba ilmu yang dilaksanakan rumah Ustadz. Selain itu, Alhamdulillah saya dan istri menikah sesuai dengan anjuran dalam agama Islam, dan kami slal memperhatikan atau menjaga yang bisa meruskan keutuhan keluarga, baik dari dalam maupun luar rumah. Demikian juga masalah harta, saya tetap memegang prsnip penuh kehati-hatian, seperti cara memperoleh harta tidak dari mencuri, riba, menipu, demikian pula mempergunakan harta hanya diperuntukan untuk hal-hal yang bermanfaat (halal) saja seperti sedekah dan infak untuk pembangunan masjid dan anak yatim”.*<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Imana, “Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari’ah Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 Dan 2014- 2016)...; Ismail, “Kesejahteraan Petani Jagung Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah (Studi Di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)...; Rinawati, “Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatipark 2 Kota Batu Dalam Prespektif Maqashid Syariah”...

<sup>64</sup>A.N (Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). Interview 06 Januari 2022, Desa Dusun Dalam.

Senada dengan ungkapan bapak P. A yang mengungkapkan bahwa:

*“Dalam persoalan menimba ilmu pengetahuan, saya dan istri serta anak-anak saya, tidak hanya mengasah keilmuan umum saja, tetapi utamanya adalah mengasah keilmuan agama yang diselenggarakan dalam 3 (tiga) kali seminggu di tempat pengajian, dengan adanya pengetahuan agama dapat membimbing dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik pula. Persolan kesehatan baik dalam maupun luar rumah, sudah dilkasakan secara baik walupun belum maksimal. Persolan membenetuk keluarga, serasa sesuai dengan anjuran Islam, diwali dengan pernikahan yang sah secara syariat, selebihnya tinggal menghindari kemudharatan yang bisa merusak dalam membangun kehidupan keluarga. Selain itu, setiap kelebihan rezeki yang doperoleh, saya sedekahkan kepada masjid atau anak yatim. Lanjut dari itu, saya sebagai kepala keluarga tidak pernah mengahadirkan harta yang berbau haram untuk keluarga, makanan yang dikonsumsi jelas kehalalannya dan bervariasi setaip harinya dengan ukuran gizi dan protein sesuai 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna”.*<sup>65</sup>

Demikian juga pasangan suami sitri bapak A.S dengan ibuk E.R mengungkapkan hal yang senada, bahwa:

*“Kami tetap memperhatikan dalam persolan makanan yang dikonsumsi harus memiliki gizi dan halal, sebab makanan yang dikonsumsi justru menimbulkan kesehatan yang baik pula. Selanjutnya, pernikahan kami serasa sudah sesuai dengan anjuran agama Islam dan juga sudah terdaftar di KUA, tinggal menjalnkanya terutama memperhatikan apa saja yang bisa merusak bagi keutuhan keluarga kami, baik dari dalam maupun luar rumah. Selain itu, Alhamdulillah harta yang kami kumpulkan jelas kehalalannya, dan tidak luput pula kami pergunakan untuk bersdekah kepada orang miskin. Terakhir, kami selalu menimba ilmu ditempat pengajian agama yang diselenggarakan 3 (tiga) hari dalam satu minggu, dan juga untuk anak kami dorong*

---

<sup>65</sup>P.A (Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). "Interview 06 Januari 2022, Desa Dusun Dalam.

*untuk menimba ilmu dirumah Ustadz selepas menimba ilmu ditempat sekolahnya".<sup>66</sup>*

Dari hasil Interview di atas, tampak bahwa hal-hal yang dilakukan masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan terhadap *Hifdzu Nafs*, dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan yang dikonsumsi jelas kehalalannya dan bergizi, serta memperhatikan pola hidup bersih dalam dan luar rumah. Terhadap *Hifdzu 'Aql*, dilakukan dengan cara menuntut ilmu pengetahuan agama Islam dan umum melalui lembaga pendidikan umum maupun Islam. Terhadap *Hifdzu Nasl*, dilakukan dengan pernikahan secara sah menurut syariat Islam dan negara, serta menghindari kemudhartan yang bisa merusak keutuhan keluarga. Terhadap *Hifdzu Maal*, juga dilkakukan dengan prinsip yang lebih hati-hati, baik dari segi memperoleh, mempergunakan atau mendsitribusikan sesuai dengan syariat Islam.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa kesejahteraan masyarakat penerima manfaat BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam sudah sejahtera dinilai secara ekonomi Islam. Hal ini bisa dilihat, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan materil (seperti kebutuhan dasar (*Basic Needs*), kebutuhan sosial psikologis (*Social Psychological Needs*), kebutuhan pengembangan (*Development Needs*) maupun spritual (seperti menjaga agama (*Hifdzu Din*), menjaga jiwa (*Hifdzu Nafs*), menjaga akal (*Hifdzu 'Aql*), menjaga keturunan (*Hifdzu Nasl*), dan menjaga harta (*Hifdzu Maal*)).

---

<sup>66</sup>A.S & E.R, Pasangan Suami Istri (Masyarakat Penerima Manfaat BUMDes Karya Dermawan). "Interview 06 Januari 2022, Desa Dusun Dalam.

Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan, karena masih banyak yang perlu ditelusuri pada BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam, seperti menata manajemen baik finansial maupun pemasaran, sekaligus mendekatkan posisinya di era pasar digital sehingga akan saling menguntungkan untuk bisa menembus pada pasar Global. Selain itu, perlu dilakukan penelitian pada tema tertentu, terutama bagaimana BUMDes dikaitkan (transformasi) kedalam sistem (prinsip) ekonomi Islam, karena pastinya akan saling menarik eksistensinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dan akan terlihat benang merahnya dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang utuh (*Continue*) dengan berprinsip ekonomi Islam.

### Daftar Rujukan

- Ahmad, K. (1980). *Studies In Islamic Economic*. Jeddah: The Islamic Foundation.
- Asiyah, B. N., Fahriani, F. Z., Sy, M., Habib, M. A. F., & Sosio, S. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Tulungagung dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*. Tulungagung: Akademia Pustaka
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (1995). *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlak Fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Albert, M. & R. Hahnel. (2017). *Quiet Revolution in Welfare Economics*. Princeton: Princeton University Press. doi:10.1515/9781400887057.
- Alfirdausi, A. A., & Riyanto, G. (2019). "The Role Of Village Owned Enterprises (BUMDes) On Efforts To Increase Original Village Income (PADES) And Village Community Welfare (Case Study On Tirta Mandiri Bumdes In Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency)." *Journal of Applied Economics in Developing Countries* Vol. 4, No. 2, 64–71. doi:https://jurnal.uns.ac.id/jaedc/article/view/44402.
- Aminah. (2017). "Maqhasid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerpan Dalam Ekonomi Islam." *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 3, No. 1: 167–84. doi:https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.635.
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian

Penerbitan STIE YKPN.

- Arwani, Agus. (2015). "Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekatkokohkan NKRI", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1: 275-294. doi: <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.275-294>
- Askari, Hossein et al. (2015). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Auda, J. (2007). *Maqasid Al-Syariah as Philosophi of Islamic Law A System Approach*. London: International Institut of Islamic Thought,.
- Bappenas. (2010) *Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I)*. Jakarta: Bappenas.
- Barry, N. (1999). *Welfare*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Cendra, Cendra, et al. "The Effect of Income with Household Consumption on The Welfare of Dodol Potato Businesses Assessed From Islamic Economic Concept." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 7.2 (2020): 81-93. doi: 10.21107/DINAR.V7I2.11214.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and The Economic Challenge*. London: International Institute of Islamic Thought.
- . (2008). *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqasid Al-Shari'ah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Choudhury, Masudul Alam & Malik, Uzir Abdul. (1992). *The Foundations of Islamic Political Economy*. 1st ed. London: Palgrave Macmillan,. doi:10.1007/978-1-349-21973-5.
- Dograwa, A. B. (2010). "Islamic Social Welfare and The Role of Zakah in the Family System." *In Munich Personal RePec Archive (MPRA)*. *University Zaria-Nigeria*,.
- El-Ashker, Ahmed & Wilson, Rodney. (2006) *Islamic Economics: A Short History*. Leiden-Boston: Brill.
- Fauzi, M. et al. (2021). Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village. *International Journal of Social Science and Business*, 5(3), 319–325. <https://doi.org/10.23887/IJSSB.V5I3.38621>
- Field, A. (2009) *Discovering Statistics Using SPSS*. London: SAGE Publications,.
- Furqani, H. & Haneef, M. A. (2009). "Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward." *8th International Conference on Islamic Economics and Finance Islamic*, 1–14.



- Huruta, A. D. et al. "The Development of Village-Owned Enterprises: Lessons Learned from Ponggok Village." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* Vol. 33, No. 1 (2020): 77–86. doi:<https://doi.org/10.20473/MKP.V33I12020>.
- Imana, A. N. (2017). "Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011- 2013 Dan 2014- 2016)." *Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Ismail. (2018). "Kesejahteraan Petani Jagung Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi Di Desa Lanci Jaya Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu)." *Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Kania, I. et al. (2021). "A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Village-Owned Enterprises in Indonesia." *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 15, No. 3: 432–450. doi:<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies.
- Kucukaksoy, I. (2011). "Adam Smith's Conceptual Contributions to International Economics: Based on the Wealth of Nations." *BEH - Business and Economic Horizons*, Vol. 4, No. 1: 108–119. doi: <http://dx.doi.org/10.15208/beh.2011.9>.
- Manan, M. A. (1988). *Islamic Economic Theory and Practice A Comperative Study*. India: Idarah Al-Adabiyah.
- McCain, R. A. (2019). *Welfare Economics: An Interpretive History*. 1st ed. New York: Routledge.
- Muhammad, Abdul Husain. (1975). *Economic System in Islam: Compared with Capitalism and Socialism*. 2st ed. Tehran: World Organization for Islamic Services.
- Mulyawan, Rahman. (2016). *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan*. Sumedang: UNPAD PRESS.
- Nurhasan, J. A. & Munawar, A. H. (2020). "Efektivitas Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Desa Panjalu." *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, Vol. 1, No. 1: 89–99. doi:<http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin/article/view/266>.
- Nuryadi et al. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Gramasurya, 2017.
- Oktafia, Renny. (2021). "Waste Bank And Community Welfare In

- Sidoarjo (Maqashid Sharia Perspective)". *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1: 454-488. doi: <https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4864>
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PERMENDes PDTT) Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDes PDTT) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama
- Pareto, V. (2014). *Manual of Political Economy*. Edited by Aldo Montesano et al. Oxford: Oxpord University Press.
- Pigou, A. C. (1920). *The Economic of Welfare*. London: Mac Millan.
- Pusparini, M. D. (2015). "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1: 45–59. doi:<http://dx.doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>.
- Ridlwani, Z. (2014). "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3: 424–440. doi:<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.
- Rinawati, I. (2018). "Analisis Kesejahteraan Pedagang Sekitar Wisata Jatimpark 2 Kota Batu Dalam Prespektif Maqashid Syariah." *Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Sari, Nopita, et al. "Pengaruh Harga Kayu Manis Terhadap Kesejahteraan Petani Ditinjau Dalam Aspek Religiusitas." *Jurnal Iqtisaduna* 7.2 (2021): 188-203. doi: 10.24252/IQTISADUNA.V7I2.25648.
- Solihin, D. (2014) *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Empat Sembilan Indonesia.
- Sudaryana, B. (2016). "The Model Of Development Policy Implementation Village Owned Enterprises In Indonesia." *Proceedings of the 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP)*, 23–29. doi:<https://doi.org/10.2991/ICOSOP-16.2017.3>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015) *Statiska Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar*

*Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sumodiningrat, G. & Wulandari, A. (2016). *Membangun Indonesia Dari Desa; Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjoetra, A. et al. (2019). "Community Poverty Reduction Strategies through a Village-Owned Enterprise in Kampung Belakang Village, West Aceh Regency." *Proceedings of the 3rd International Conference on Social and Political Development - Volume 1: ICOSOP* 3, 2, 356–359. doi:<https://doi.org/10.5220/0010033503560359>.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Weber, M. (2001). *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. New York: Routledge.

Winarti, S. E. et al. (2020). "Pemberdayaan Kelompok Perempuan Menggunakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa." *Sosio Konsepsia; Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9, No. 2: 171–184. doi:<https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1854>.

Yusuf, A. M. (2005). *Metodologi Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.